BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya otonomi daerah menuntut pemerintah untuk melakukan tugasnya dengan baik secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Transparansi pengelolaan keuangan tersebut masyarakat dapat memperoleh informasi secara faktual, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penilaian ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan. Instrumen yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tecantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Pengelolaan keuangan yang transparan atas kinerja keuangan daerah merupakan hal penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk memberikan jaminan pemerintah yang bersih dari tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut dikarenakan bagian pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang paling rawan terjadinya tindakan korupsi yang jelas-jelas dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut perlu adanya pemerintahan yang bersih dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan keuangan daerah.

Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yang bersih merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya memerlukan media tertentu. Salah satu alat untuk

memfasilitasi terciptanya transparansi laporan keuangan pemerintah daerah yang kompetitif adalah dengan penyajian laporan keuangan pemerintah yang komprehensif, laporan keuangan pemerintah tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan akurat dengan anggaran melalui kondisi dan hasil operasional, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas.

Keadaan yang semakin komplek dan perubahan yang demikian cepat menyebabkan banyak perkembangan pemikiran dan peran pada segala bidang usaha. Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan atas keuangan daerah menjadi semakin kompleks terutama dari segi pengukuran tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Berdasarkan kenyataan tersebut maka diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan sektor publik sehingga pengelolaan segala sumber daya daerah dapat secara maksimal.

Pengukuran kinerja keuangan pada sektor publik memiliki peran yang penting sebagai upaya untuk memberikan dukungan terhadap pihak-pihak yang berkompeten untuk mengevaluasi kondisi keuangan pada suatu pemerintah daerah. Melalui pengukuran atas kinerja keuangan maka akan diperoleh gambaran yang jelas atas kondisi kinerja keuangan yang telah dicapai. Pada sisi yang lain pentingnya pengukuran atas kinerja keuangan yaitu akan memberikan dukungan sebagai upaya pemeriksaan agar keuangan daerah yang merupakan instansi publik dapat digunakan sesuai dengan

ketentuan yang belaku sehingga dapat menghindari terjadinya penyelewengan yang dapat dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja sebagai pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran atas kinerja keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah pada masa yang akan datang, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih atas pelaksanaan dan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijaksanaan anggaran daerah (Halim, 2007:1).

Alat analisis yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yaitu antara lain menggunakan konsep balanced scorecard, tolok ukur yang digunakan ada empat perspektif keuangan, pelanggan, proses internal bisnis serta belajar dan berkembang. Namun proses balanced scorecard tidak memasukkan unsur biaya modal, dimana biaya modal menunjukkan besarnya kompensasi yang dituntut oleh investor atas modal yang diinvestasikan. Sedangkan apabila menggunakan economic value added (EVA) maka kinerja keuangan hanya mendasarkan pada tingkat profitabilitas yang realistik dari operasi perusahaan. EVA merupakan sistem yang disesuaikan dengan manajemen keuangan karena bertitik berat pada nilai bagi investor.

Selanjutnya terkait dengan pengukuran atas kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan atas kinerja keuangan yang telah terjadi. Beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan data keuangan yang dimiliki dan bersumber pada APBD antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi serta *debt service coverage ratio* (Halim, 2007:231). Analisis yang dihitung dan diinterpretasikan secara tepat akan dapat menunjukkan aspek-aspek mana yang perlu dievaluasi dan dianalisa lebih lanjut. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan maka penilaian kinerja suatu instansi mempunyai kepentingan terhadap perkembangan pada masa yang akan datang.

Kabupaten Blitar memiliki daya tarik potensi dan kekayaan yang bukan hanya pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil-hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi *"point of essential"* terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar (www.profil kabupaten blitar.co.id).

Apabila dikaitkan dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar tersebut secara langsung mendukung peningkatan atas kinerja keuangan daerah. Selama ini dalam pengukuran atas kinerja keuangan yang telah dicapai Pemrintah Daerah menggunakan anggaran atas keberhasilan pencapaian kinerja yang telah dicapai. Pengukuran kinerja tersebut dengan sendirinya terdapat beberapa kelemahan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam pengambilan kebijakan secara tepat. Berdasarkan kenyataan tersebut maka diperlukan suatu alat analisis yang tepat dalam pengukuran atas kinerja keuangan daerah. Penelitian ini akan mengukur dan menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

Pengukuran kinerja keuangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sangat penting karena dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai selama ini. Pengukuran tersebut juga dapat dijadikan sebagai dasar penentuan kebijakan terkait dengan peningkatan kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Blitar dengan memaksimalkan pemanfaatan atas sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pada sisi lain melalui pengukuran atas kinerja keuangan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dapat menjadi tolok ukur keberhasilan atas program-program yang telah ditetapkan sehingga upaya untuk memaksimalkan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Blitar dapat terealisasi secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul penelitian yang dilakukan yaitu : **"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar".**

B. Permasalahan

Aspek keuangan merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Tahun 2007 - 2009 prosentase Pendapatan cenderung mengalami penurunan dan adanya peningkatan prosentase Pendapatan Tahun 2009 – 2011 dengan meminimalisir biaya-biaya dalam upaya memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kinerja seluruh elemen yang dimiliki oleh instansi untuk bekerja secara maksimal dalam usaha merealisasi anggaran pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan, ini membuktikan adanya peningkatan atas kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki di wilayah Kabupaten Blitar dalam upaya mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar selama periode Tahun 2007 – 2011 ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yaitu untuk menganalisis dan mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti serta untuk memperoleh pengalaman dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

MILIK PERPUSTAKAAN
STIE KESUMA NEGARA BLITAR

b. Bagi Instansi

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi dan pengambilan keputusan yang berkenaan dengan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

c. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan sebagai pengukuran transparansi atas kinerja keuangan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

d. Bagi Investor

Bagi investor dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi atas sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar perbandingan untuk dijadikan evaluasi dan dapat dikembangan lagi menjadi suatu penelitian lanjutan.